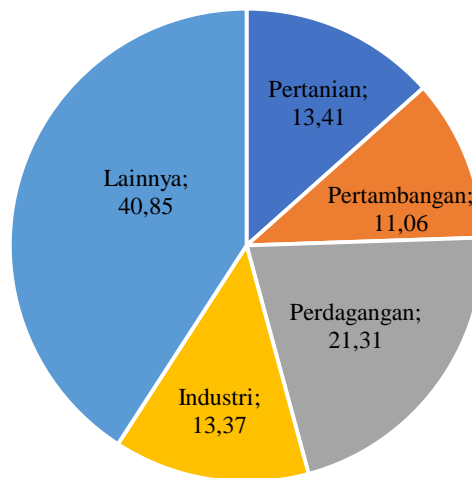


## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian diyakini menjadi sektor yang mampu berkontribusi positif dalam mewujudkan pembangunan Indonesia. Peran strategis sektor pertanian dibuktikan dalam kontribusinya sebagai penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penghasil devisa negara, penyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB), penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Bahkan, beberapa produk pertanian yang dihasilkan memiliki keunggulan komparatif dan menjadi primadona ekspor (Kementrian Pertanian RI, 2015).



**Gambar 1.1**  
**Rata-Rata Distribusi PDB Tahun 2014–2017 (Persen)**  
Sumber: Badan Pusat Statistik (2018)

Menurut Badan Pusat Statistik (2018), rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDB tahun 2014-2017 sebesar 13,41 persen sehingga menjadikan sektor ini sebagai penyumbang PDB terbesar kedua setelah sektor perdagangan, dan ketiga adalah sektor industri pengolahan. Keyakinan terhadap kemampuan sektor pertanian dalam kontribusinya terhadap perekonomian negara, Menteri Keuangan

**Yayu Yuliana, 2019**

*PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH PADA SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA: ANALISIS TINGKAT NON PERFORMING FINANCING SEKTOR PERTANIAN, DANA PIHAK KETIGA, NILAI TUKAR RUPIAH DAN IMBAL HASIL SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH PERIODE OKTOBER 2014 - DESEMBER 2018*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Republik Indonesia beserta jajarannya memastikan segala kesiapan di sektor pertanian, mulai dari kesiapan infrastruktur pertanian, sarana produksi, regulasi dan lainnya. Hal tersebut sejalan dengan upaya strategis untuk Indonesia menjadi lumbung pangan dunia tahun 2045 (Indrawan, 2018).

Akan tetapi, pembangunan sektor pertanian bukannya terlepas dari berbagai permasalahan. Permasalahan yang menjadi kendala bagi pembangunan sektor pertanian diantaranya adalah konversi lahan yang tidak terkendali, laju konversi lahan sawah mencapai 100 ribu hektar per tahun, sedangkan pencetakan lahan sawah baru oleh pemerintah hanya 40 ribu hektar per tahun. Selain itu, kurangnya pembangunan jaringan irigasi baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun serta keterbatasan petani dalam pemanfaatan teknologi (Kementrian Pertanian RI, 2015).

Masalah permodalan yang kecil pun menjadi masalah yang sangat riskan dalam pembiayaan pertanian. Penyebab kecilnya permodalan di sektor pertanian adalah buruknya komunikasi dan minimnya informasi antara sektor pertanian dan lembaga keuangan baik perbankan maupun non-perbankan. Para pelaku bisnis di sektor pertanian kurang aktif dalam menyampaikan peluang bisnis dan prospek usaha pertanian kepada pelaku usaha dan pemegang modal, terutama lembaga pembiayaan sehingga sektor pertanian menjadi kurang diminati oleh lembaga pembiayaan, terutama bagi sektor perbankan. Selain itu, sektor perbankan tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai prospek sektor pertanian. Pemahamannya hanya terbatas pada persepsi atau literatur ekonomi pembangunan, bahwa pertanian itu sebagai suatu sektor usaha sangat beresiko, tergantung musim, jaminan harga yang tidak pasti, dan sebagainya (Asaad, 2011).

Masalah permodalan yang dihadapi sektor pertanian menyebabkan menurunnya hasil pertanian, dan pada jangka panjang akan mengurangi peran sektor pertanian terhadap PDB. Alasan selanjutnya dari kurangnya pembiayaan sektor pertanian oleh sektor keuangan adalah karena sektor pertanian merupakan sektor usaha yang memiliki resiko sangat tinggi dibandingkan dengan sektor usaha lainnya (Toha & Saptia, 2009).

Kinerja sektor pertanian dalam pembangunan perekonomian Indonesia pun terus mengalami perlambatan. Tahun 2014 laju pertumbuhan sektor pertanian sebesar 4,24% dan mengalami perlambatan pada tahun 2016 menjadi 3,25%. Perannya dalam perekonomian hanya sekitar 13% selama kurun waktu 3 tahun yaitu periode 2014-2016 (Septyaningsih, 2017).

Saat ini usaha di sektor pertanian pun kurang diminati oleh masyarakat, indikasinya adalah terjadi penurunan Rumah tangga Usaha Pertanian (RTUP). Menurut hasil sensus pertanian tahun 2018, terjadi penurunan RTUP dari tahun 2003 sebesar 31.323 menjadi 27.682, penurunan terbesar terjadi pada subsektor hortikultura (Badan Pusat Statistik, 2018).

Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat dinilai salah satunya dari profil risiko bank secara inheren dengan penerapan kualitas manajemen risiko pembiayaan perbankan syariah. Skeptis inilah yang menimbulkan kecilnya pembiayaan bank umum syariah untuk permodalan aktivitas tani (Maulana & Iskandar, 2018).

Perbankan nasional secara teori memiliki potensi yang sangat besar sebagai salah satu sumber permodalan bagi sektor pertanian. Namun, fakta menunjukkan kecenderungan perbankan nasional kurang antusias untuk menyalurkan dananya pada sektor pertanian (Ashari, 2009). Hal tersebut tercermin dari rendahnya penyaluran kredit perbankan di sektor pertanian pada tahun 2018 yang baru mencapai Rp 334 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Alokasi pembiayaan perbankan tersebut belum mampu mengatasi permodalan petani dan dukungan perbankan belum memberikan kontribusi yang optimal bagi petani. Hal ini disebabkan karena sumber dana dan risiko ditanggung oleh bank secara keseluruhan, maka perbankan menerapkan *prudential* perbankan. Akibat dari diterapkannya *prudential* perbankan yaitu sulitnya akses permodalan bagi petani, persyaratan yang rumit dan membutuhkan waktu lama, serta diperlukan jaminan tambahan yang memberatkan petani (Kementrian Pertanian RI, 2015).

Masalah ketimpangan pembiayaan yang terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya kemampuan sektor pertanian untuk mengembalikan pembiayaan, namun juga karena keberpihakan yang sangat rendah pada sektor ini.

**Yayu Yuliana, 2019**

**PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH PADA SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA: ANALISIS TINGKAT NON PERFORMING FINANCING SEKTOR PERTANIAN, DANA PIHAK KETIGA, NILAI TUKAR RUPIAH DAN IMBAL HASIL SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH PERIODE OKTOBER 2014 - DESEMBER 2018**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Konsep bagi hasil merupakan skema yang tepat untuk kegiatan ekonomi masyarakat petani. Apabila orientasi pembiayaan bank syariah pada usaha-usaha sektor riil, maka akan lebih baik jika usaha di bidang pertanian mendapat porsi besar dalam permodalan. Bank syariah memiliki peran yang strategis sebagai lembaga intermediasi antara pasar uang dengan dunia usaha ekonomi riil khususnya sektor pertanian (Nasution, 2016).

Minimnya alokasi kredit di sektor pertanian dapat diselesaikan salah satunya yaitu dengan pembiayaan yang dikembangkan dengan pola syariah, perbankan syariah menerapkan berbagai macam akad yang mengatur setiap kegiatannya secara Islami. Pola syariah cenderung tidak berpihak pada nasabah atau bank syariah, melainkan memberikan kemaslahatan bersama dengan sistem bagi hasil dan menghapus beban bunga yang berkelanjutan, dan dengan sektor pertanian yang memiliki risiko cukup besar karena waktu panen yang terbilang rentan terhadap iklim, semakin menjadikan pola syariah mampu menjadi alternatif pembiayaan untuk sektor pertanian di Indonesia (Mughits & Wulandari, 2016).

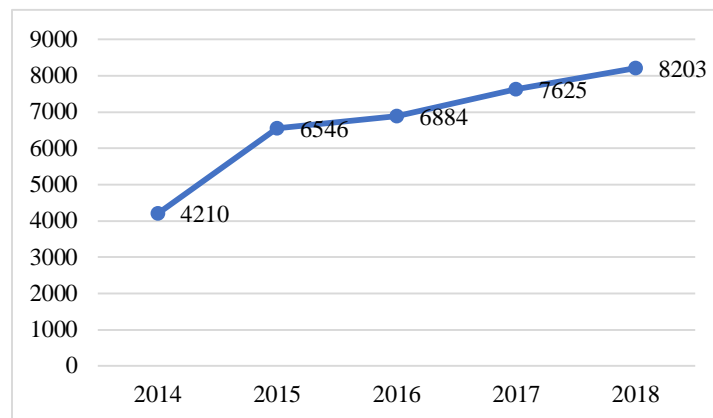
Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah, total aset perbankan syariah terus meningkat setiap tahunnya. Besarnya aset yang dimiliki tidak lepas dari jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan syariah. Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam ajaran Islam tidak boleh dibiarkan terhimpun, namun harus digulirkan melalui pembiayaan yang diberikan kepada sektor riil (Jaya, Rindayati, & Ali, 2017).

**Tabel 1.1**  
**Total Aset Perbankan Syariah Tahun 2015-2017 (Miliar Rupiah)**

<b>Perbankan Syariah</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Bank Umum Syariah	213.423	254.184	288.027
Unit Usaha Syariah	82.839	102.320	136.154

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2018)

Sejalan dengan terus meningkatnya aset perbankan syariah dari tahun ke tahun, pembiayaan bank umum syariah pada sektor pertanian pun terus meningkat. Berikut grafik tingkat pembiayaan Bank Umum Syariah pada sektor pertanian dalam kurun waktu lima tahun terakhir:



**Gambar 1.2**

**Pembiayaan BUS Pada Sektor Pertanian Tahun 2014-2018 (Miliar Rupiah)**

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2018)

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan secara jelas bahwa alokasi pembiayaan bank umum syariah untuk sektor pertanian mengalami kenaikan. Namun pembiayaan di Sektor pertanian yang dilirik oleh perbankan syariah masih sangat kecil, hal tersebut bertolak belakang dengan posisi pertanian sebagai penopang kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Pembiayaan bank umum syariah pada sektor pertanian sampai April 2019 hanya sebesar 8.735 miliar rupiah, masih dibawah jumlah pembiayaan sektor ekonomi perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, dan konstruksi.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan pada sektor pertanian di bank umum syariah. Penelitian ini mengaitkan sejauh mana kinerja bank syariah, kondisi makro ekonomi, dan instrumen moneter syariah dalam mempengaruhi pembiayaan bank umum syariah pada sektor pertanian di Indonesia.

Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa variabel saja. Variabel yang menggambarkan kinerja perbankan syariah diantaranya pembiayaan BUS sektor pertanian, *Non Performing Financing* (NPF) sektor pertanian, dan Dana Pihak Ketiga (DPK), nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, dan untuk variabel yang menggambarkan instrumen moneter syariah yaitu imbal hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Dalam penelitian ini pembiayaan bank umum syariah pada sektor pertanian pun hanya dibatasi pada sektor lapangan usaha pertanian, perburuan, dan kehutanan karena pada sektor

lapangan usaha ini pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah cukup besar dan dengan nilai pembiayaan bermasalah yang cukup tinggi.

Merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Kususmawati (2013), bahwa hasil estimasi VECM menyatakan signifikansi negatif NPF dalam mempengaruhi rasio pembiayaan baik pada jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi pembiayaan bermasalah, maka menyebabkan semakin rendah bank syariah menyalurkan pembiayaan karena bank syariah harus membentuk cadangan penghapusan yang lebih besar. Sejalan dengan penelitian Adzimatinur, Hartoyo, & Wiliasih (2014), NPF memiliki hubungan signifikan yang negatif terhadap pembiayaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, ketika NPF naik maka dana yang ada tidak bisa diputar pada pembiayaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Qolby (2013), bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian yang dilakukan oleh Prayuningrum & Hasib (2017), bahwa DPK memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah. DPK merupakan sumber dana terbesar bagi pembiayaan, semakin tinggi DPK akan meningkatkan pembiayaan yang diberikan.

Mughits & Wulandari (2016), dalam jangka pendek variabel yang mempengaruhi kontribusi pembiayaan bank syariah untuk sektor pertanian di Indonesia secara positif signifikan adalah variabel nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, sedangkan dalam jangka panjang tidak berpengaruh secara signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Dwijayanty (2017), bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh positif terhadap permintaan pembiayaan *murabahah* perbankan syariah.

Septindo, Novianti, & Lubis, (2016), imbal hasil SBIS berpengaruh secara negatif signifikan terhadap penyaluran dana ke sektor pertanian. Hal ini dikarenakan ketika Bank Indonesia melakukan kontraksi moneter dengan menaikkan bonus SBIS, maka bank syariah melakukan pembelian SBIS pada Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter dan pengelolaan likuiditas. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nurhasanah & Darma (2009), menjelaskan

bahwa SWBI atau yang sekarang disebut dengan SBIS berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan diatas yang didukung oleh hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik dan penting untuk melakukan penelitian. Adapun penelitian ini tertuang dalam judul **“Pembiayaan Bank Umum Syariah pada Sektor Pertanian di Indonesia: Analisis Tingkat Non Performing Financing Sektor Pertanian, Dana Pihak Ketiga, Nilai Tukar Rupiah dan Imbal Hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah Periode Oktober 2014 – Desember 2018”** dengan menggunakan metode *Vector Error Correction Model* (VECM) agar dapat mengetahui sejauh mana pengaruh variabel NPF, DPK, nilai tukar rupiah dan imbal hasil SBIS terhadap pembiayaan BUS pada sektor pertanian di Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis dapat merumuskan masalah dan mengetahui permasalahan sebagai berikut:

1. Kinerja pertanian dalam perekonomian Indonesia terus melambat (Septyaningsih, 2017). Tercermin dari rendahnya penyaluran kredit perbankan untuk sektor pertanian pada tahun 2018 hanya mencapai 641,08 miliar rupiah (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).
2. Kecenderungan perbankan nasional kurang antusias untuk menyalurkan dananya pada sektor pertanian (Ashari, 2009). Dikarenakan Sektor pertanian merupakan sektor usaha yang memiliki resiko sangat tinggi dibandingkan dengan sektor usaha yang lainnya (Toha & Saptia, 2009).
3. Alokasi pembiayaan perbankan belum mampu mengatasi permodalan petani dan dukungan perbankan belum memberikan kontribusi yang optimal bagi petani (Kementrian Pertanian RI, 2015).
4. Buruknya komunikasi dan informasi antara sektor pertanian dan lembaga keuangan, serta sektor perbankan tidak memiliki pemahaman yang lengkap tentang prospek sektor pertanian (Asaad, 2011).

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penulis merumuskan melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan bank umum syariah pada sektor pertanian di Indonesia?
2. Sejauh mana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) sektor pertanian terhadap pembiayaan bank umum syariah pada sektor pertanian di Indonesia?
3. Sejauh mana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan bank umum syariah pada sektor pertanian di Indonesia?
4. Sejauh mana pengaruh nilai tukar rupiah terhadap pembiayaan bank umum syariah pada sektor pertanian di Indonesia?
5. Sejauh mana pengaruh imbal hasil SBIS terhadap pembiayaan bank umum syariah pada sektor pertanian di Indonesia?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka ada tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan pembiayaan perbankan syariah pada sektor pertanian di Indonesia.
2. Menganalisis sejauh mana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) sektor pertanian terhadap pembiayaan bank umum syariah pada sektor pertanian di Indonesia.
3. Menganalisis sejauh mana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan bank umum syariah pada sektor pertanian di Indonesia.
4. Menganalisis sejauh mana pengaruh nilai tukar rupiah terhadap pembiayaan bank umum syariah pada sektor pertanian di Indonesia.
5. Menganalisis sejauh mana pengaruh imbal hasil SBIS terhadap pembiayaan bank umum syariah pada sektor pertanian di Indonesia.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, meningkatkan wawasan serta pemahaman bagi pengembangan ilmu

Yayu Yuliana, 2019

PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH PADA SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA: ANALISIS TINGKAT NON PERFORMING FINANCING SEKTOR PERTANIAN, DANA PIHAK KETIGA, NILAI TUKAR RUPIAH DAN IMBAL HASIL SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH PERIODE OKTOBER 2014 - DESEMBER 2018

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



khususnya pada pembiayaan perbankan syariah di sektor pertanian, Kemudian dapat menguatkan penelitian sebelumnya dan mendukung penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor pembiayaan pada perbankan syariah.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi *stakeholder*, baik itu perbankan syariah maupun regulator atau pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan dan kebijakan terutama dalam bidang pembiayaan perbankan syariah pada sektor riil di Indonesia.